



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

Volume. III / No. 03 / Januari - Maret 2019

Kemaritiman

Majalah Triwulan



**Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Republik Indonesia
Biro Informasi dan Hukum**

Gedung BPPT, Lantai 5
Jl. MH. Thamrin no. 8, Jakarta Pusat
Telp. 021-2395 1100
E-mail: kemenkomaritim@maritim.go.id
Website: www.maritim.go.id



Tidak untuk dipertanggungjawabkan

Jembatan Gantung
Situgunung

Deputi Agung:
**Saya Punya
Mimpi Besar
Untuk Hilangkan
Stunting**

**Gerakan Indonesia
Bersih**

Perwujudan Revolusi Mental,
Cinta Lingkungan Hidup

Hamish Daud:
**Sudah Tidak Jaman
Buang Sampah
Sembarangan!**

wonderful
indonesia

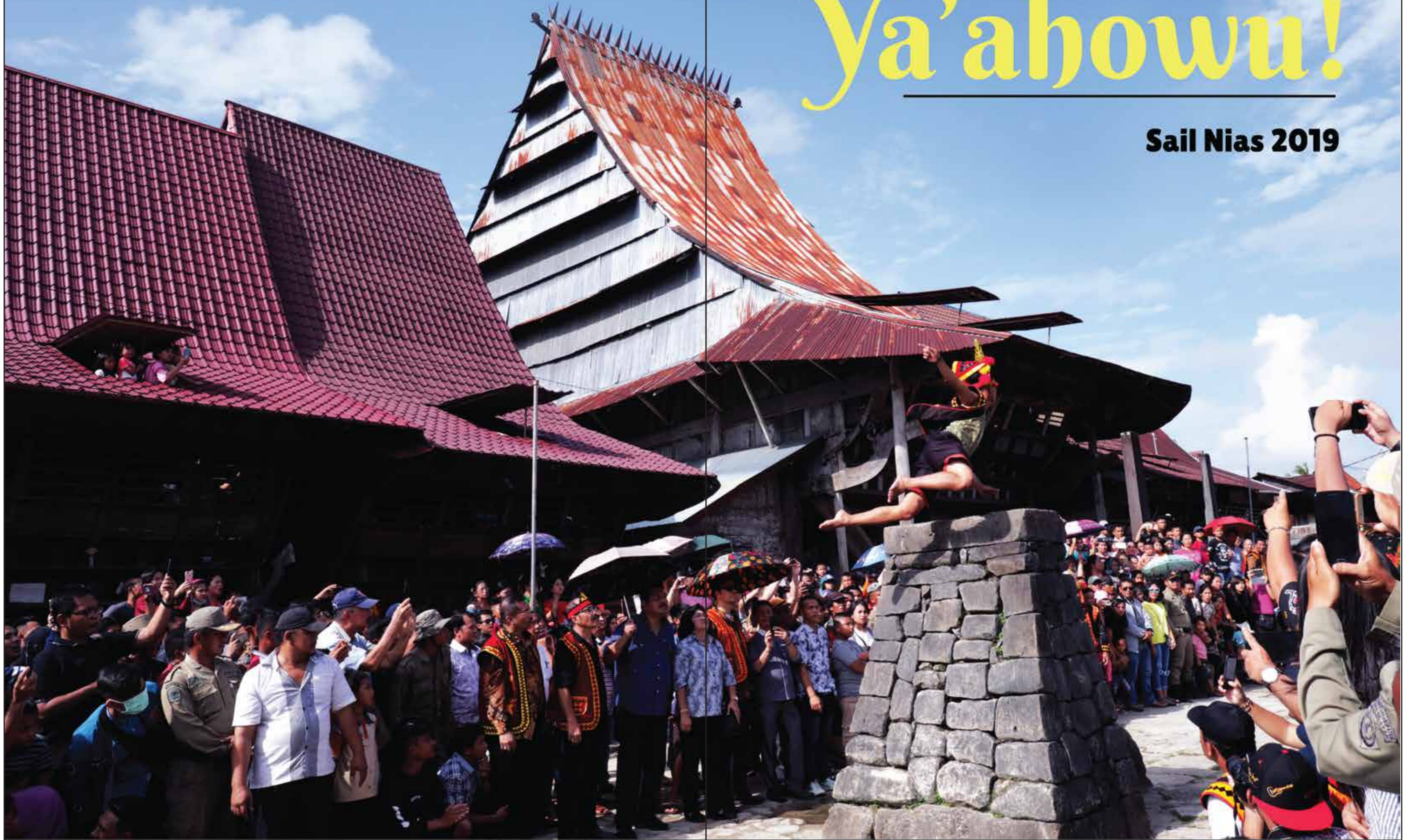


KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



Ya'ahowu!

Sail Nias 2019



Sambutan Hangat

Assalamu'alaikum,
Salam Sejahtera untuk kita sahabat maritim!

Memasuki tahun kelima, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terus berupaya untuk memenuhi janji menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan demi memuaskan kebutuhan masyarakat akan informasi tentang perkembangan pelaksanaan program kemaritiman, permasalahan-permasalahan di sektor kemaritiman serta serba-serbi maritim, pada tahun 2019 ini Majalah Kemaritiman kembali menyapa pembaca.

Dengan bahasa yang lugas, kami berupaya untuk meningkatkan kedekatan dengan para mitra kemaritiman untuk bersama-sama maju mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia bukan cuma slogan, melainkan visi kita bersama. Bukanlah hal yang mudah mewujudkan ini tapi bukan tak mungkin untuk mencapainya, sebab bangsa kita sudah memiliki trah sebagai bangsa maritim yang digdaya di masa lalu.

Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia, milik dari posisi strategisnya di antara Benua Asia dan Australia, diantara dua samudera dengan lalu lintas laut yang sibuk, yakni Samudera Pasifik dan Hindia.

Semesta pun telah berpihak pada kita dengan menyediakan sumber daya hayati yang melimpah. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi maritim luar biasa. Untuk mewujudkan visi ini diperlukan kerja luar biasa pula. Upaya itu berupa pembangunan konektivitas yang terintegrasi baik di darat laut dan udara, mempermudah jalur logistik terutama ke pulau-pulau terpencil dan terluar Indonesia, mengelola sumber daya energi, potensi kelautan, pariwisata hingga



Agus Purwoto
Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman
Republik Indonesia

melestarikan budaya. Tak seperti yang lazim dibayangkan awam bahwa kemaritiman hanya mengurus soal-soal yang berhubungan dengan kelautan. Sungguh bicara kemaritiman bukan hanya laut semata, kita akan membahas koordinasi, kerja terintegrasi tanpa kenal lelah yang semuanya akan diungkap melalui majalah ini.

Di mana pun Anda nanti, Majalah ini akan terkoneksi dengan Anda. Untuk menjalin interaksi dengan para sahabat mitra Kemaritiman, kami pun membuka kanal media sosial Twitter, Facebook dan Instagram. Selain itu, kami juga memiliki www.maritim.go.id selaras dengan siklus berita 24/7, memberikan berita, eksklusif, dalam isu-isu kemaritiman terkini dengan pengkinian berita setiap hari. Sementara, Majalah Kemaritiman menjadi kombinasi kuat dari berita, budaya, dan gagasan dengan sudut pandang Indonesia poros maritim dunia dikupas dengan jernih dan terpercaya.

Majalah Kemaritiman disiapkan untuk memberikan informasi yang mendidik dan mencerahkan kepada para pembacanya, selain itu juga memberikan konten pemikiran untuk pembaca cerdas. *Platform digital* maupun cetak ini merupakan saluran berita pilihan yang mudah diakses. Akhir kata, selamat menikmati edisi pertama majalah kemaritiman di tahun 2019, mari bersama wujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Latief Nurbana
Pemimpin Redaksi Majalah Kemaritiman
Kepala Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman



Catatan Editor

Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Kemaritiman,

Setelah sukses dengan peluncuran Majalah Kemaritiman di Tahun 2018, Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kembali meluncurkan Majalah Kemaritiman Tahun 2019 Edisi I untuk Triwulan pertama. Pada edisi pertama ini, Majalah Kemaritiman akan mengangkat berita utama mengenai Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan yang memimpin Rapat Kerja Nasional Gerakan Indonesia Bersih (GIB).

Artikel lainnya yang akan diulas adalah, berita seputar Deputi di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman, di mana Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim mengangkat tema mengenai kerjasama dengan CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*), Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa mengangkat tema Program LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi), Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur mengangkat tema Infrastruktur Pelabuhan yang semakin dikembangkan dan Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim mengangkat tema mengenai kemitraan global untuk perang terhadap sampah.

Tidak ketinggalan, dalam Majalah Kemaritiman edisi kali ini juga menampilkan galeri foto dan ulasan mengenai Jembatan Gantung Situgunung, yang merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara, dan diresmikan langsung oleh Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan. Majalah Kemaritiman edisi kali ini pun menyuguhkan kolom 'Tokoh Bicara', yang diisi hasil perbincangan dengan Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Agung Kuswandono dengan topik program kerja yang sedang dilaksanakan oleh kedeputiannya, diantaranya perihal penghilangan *stunting*, rehabilitasi *mangrove* dan perikana budidaya beserta pengembangan produk turunannya.

Akhir kata, saya mewakili seluruh tim yang telah bekerja keras untuk penerbitan volume III Majalah Kemaritiman 2019 ini, menghaturkan maaf apabila masih ada kekurangan yang tidak disengaja, dan juga mengucapkan selamat membaca Majalah Kemaritiman ini. Segala kritik dan saran anda semua sangat kami hargai, dan kami juga membuka untuk para pembaca yang ingin mengirimkan artikel untuk dapat dimuat di Majalah Kemaritiman, www.maritim.go.id.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Tim Redaksi

Terbitan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Penanggung Jawab
Agus Purwoto
Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman

Pemimpin Redaksi
Latief Nurbana
Kepala Biro Informasi dan Hukum

Redaktur Majalah
Anjang B. Prasetyo
Kabag Hubungan Masyarakat
Khairul Hidayati
Kasubbag Publikasi
Fatma Puspitasari
Kasubbag Pengelolaan Opini Publik
R. Eka Prasetya
Kasubbag Dokumentasi

Jurnalis & Penulis
Fahdiansyah Kasmiri
Nostal Nuans Saputri
Wa Ode Sukma
Meidika Sri VV.

Desain Grafis & Layout
Dinta Audi Rahmalia
Bella Rahmah Herlita

Fotografer
Vebianto Faladi
Muchlisa Choiriah
Ilma Nurweli
Grace Natasha Siregar
Donatus Imanuel S.



Daftar Isi

Liputan Utama 10

Gerakan Indonesia Bersih

Liputan

<p>Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim 12</p> <p>Buku Putih Diplomasi Maritim: Suar Penuntun Aksi Nyata dalam Diplomasi Maritim</p>	<p>Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur 16</p> <p>Pemerintah Matangkan Rencana Pembangunan Jaringan Pelabuhan Terpadu</p>
<p>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 14</p> <p>Seluruh Desa di Indonesia di Wilayah Terdepan dan Terisolir Harus Terang</p>	<p>Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim 18</p> <p>Ayo Indonesia Bangkit dengan Gerakan Masif Anti Sampah Plastik</p>



Bincang Tokoh

Deputi Agung:
Saya Punya Mimpi Besar Untuk Hilangkan Stunting 21

Kolom Reformasi Birokrasi

Workshop
Implementasi Nilai Paten: Menjadikan Indonesia yang Terbaik 24

Bimtek RKA-K/L
Pembekalan Teknis Anggaran Berbasis Keseragaman Data 26

Feature

Hamish Daud:
Sudah Tidak Jaman Buang Sampah Sembarangan! 30

Explore!
Jembatan Gantung Situ Gunung 32

Cerpen
Banjir Bandang 34

Resensi

Film
Triple Frontier 37

Galeri Foto 38

Kumpulan dokumentasi kegiatan Kemenko Bidang Kemaritiman



Majalah Kemaritiman-Jakarta, Tepat di Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pemerintah menggelar Rapat kerja Nasional Gerakan Indonesia Bersih (Rakernas GIB), dihelat di Auditorium Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis 21 Februari 2019.

Rakernas tersebut dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan menghadirkan Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wamen ESDM Archandra Tahar dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar selaku tuan rumah dan juga para Gubernur serta Bupati/Walikota se-Indonesia.

GIB sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Dan Rakernas GIB, diadakan untuk menyamakan persepsi dari seluruh pimpinan di daerah, yang

ditargetkan ada kesepahaman dalam membuat mekanismenya melalui sebuah payung hukum sebagai regulasi.

Menurut Menko Luhut, menuntaskan permasalahan sampah di Indonesia adalah sebuah keharusan. Permasalahan sampah, terutama sampah plastik tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan, perlu perhatian lebih dari para pengambil kebijakan baik pusat maupun daerah.

“Dengan GIB, kalian para pemimpin daerah telah membuat satu *legacy* yang bagus kepada generasi penerus, karena dimana wilayah kalian memerintah adalah wilayah yang sehat, bersih dan nyaman. Gerakan semua unsur dan tanamkan kedisiplinan serta pola pikir hidup bersih sejak dini, saatnya kita ubah budaya kita dengan budaya GIB,” ujar Menko Luhut.

Fokus Program GIB memberikan penekanan pada peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan



kerja, dan komunitas. Kedua, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik. Keempat, penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi).

Kelima, pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah. Keenam mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat. Dan ketujuh, peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Adapun, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai persampahan, seperti UU Nomor 18/2008, tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81/2012 soal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Juga Peraturan Presiden Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Pemerintah juga telah menetapkan target sampah kelola 100% pada 2025, dengan pengurangan 30% dan penanganan sampah 70%. Sesuai dengan Perpres Nomor 97/2017, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota wajib menyusun dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah paling lama satu tahun sejak aturan ada. Setiap daerah, perlu membuat perencanaan pengurangan dan penanganan sampah di daerah masing-masing. Sampai Januari 2019, baru 308 kabupaten kota dan 15 provinsi menyelesaikan dokumen tersebut.

Lebih lanjut pemerintah pun sudah mempunyai beberapa program andalan, yang terdiri atas dua kategori yakni program reguler dan khusus. Kategori program reguler terdiri atas pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS-3R), Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kemudian, pada kategori program khusus, terdiri atas program Citarum Harum, pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dan *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Perhatian Nasional dan Internasional pada sampah terus tertuju pada sampah plastik yang berdampak para manusia dan satwa. Sampah plastik di laut ukuran mikro atau *marine debris* sangat berbahaya karena mengganggu kesehatan apabila *debris* masuk dalam pencernaan ikan dan masuk dalam sistem rantai pangan. Dan telah berulang kali pula Menko Luhut selalu menegaskan agar permasalahan sampah ini tidak dikerjakan secara parsial namun harus ada sinergisitas antar seluruh elemen.

“Ini menjadi urusan kita bersama. Jadi masalah ini tidak ada urusannya dengan orang kaya-miskin, dengan urusan politik apapun dan agama. Urusannya ada pada tanggung jawab kepada dirimu, kepada Sang Pencipta, dan para generasi kita. Dosa Anda dan kita paling besar adalah ketika menciptakan generasi kuntet karena tindakan kita yang keliru, dan oleh karena kita yang tidak berbuat apapun,” tegas Menko Luhut.





Buku Putih Diplomasi Maritim: Suar Penuntun Aksi Nyata dalam Diplomasi Maritim

Majalah Kemaritiman – Jakarta, Indonesia telah meraih kemerdekaannya sebagai bangsa berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun butuh perjuangan yang berat dan panjang untuk menjadi bangsa yang berdaulat penuh atas wilayah perairan kepulauannya. Pasca tahun 1945, kapal-kapal asing dapat berlayar dengan bebas di wilayah laut teritorial RI. Kala itu, Indonesia masih berpatokan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (Staatblad tahun 1939 No.442). Dalam peraturan tersebut lebar laut teritorial Indonesia hanya 3 nautikalmil, dan penetapan lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal yang menggunakan garis air rendah (pasang surut), yang mengikuti garis pantai masing-masing pulau Indonesia.

Aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda ini kemudian dianulir oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja

melalui sebuah keputusan yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu memuat konsepsi nusantara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No.4 Perpu Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Isinya antara lain lebar laut teritorial Indonesia berubah menjadi 12 mil laut yang sebelumnya 3 nautikalmil laut diukur dari garis pantai yang menghubungkan titik-titik terluar dari ujung-ujung pulau Indonesia.

Konsepsi yang ditawarkan oleh Indonesia akhirnya diakui oleh dunia internasional, dan dibakukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) Tahun 1982. Konvensi tersebut telah disahkan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim. Semangat inilah yang mengilhami Kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun cita-cita tanpa aksi takkan pernah membuahkan hasil.

Untuk merealisasikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, pertama kalinya Indonesia memiliki sebuah buku putih mengenai kebijakan kelautan Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam buku putih yang telah dibakukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tersebut adalah mengenai diplomasi maritim.

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memperkenalkan konsep diplomasi maritim ini kepada para pembuat kebijakan, diplomat negara-negara sahabat, akademisi, dan media di gedung *Centre for Strategic and International Studies*, Jakarta, Jumat (22-2-2019).

"Selama ini Indonesia juga tidak punya buku putih mengenai diplomasi maritim," ujarnya dalam Kuliah Umum bertajuk "*Indonesia's Maritime Diplomacy: the Current Challenges*".

Kini, Kemenko Bidang Kemaritiman telah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Diplomasi Maritim yang digunakan sebagai panduan, bagi para pemangku kepentingan nasional mengenai arah kebijakan dan langkah nyata Diplomasi Maritim Indonesia sehingga tercapai sinergi antar para pemangku kepentingan. Kedua, Buku Putih Diplomasi Maritim juga diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat internasional mengenai arah yang ingin dicapai Indonesia.

"Ada 4 sasaran dalam buku putih itu, antara lain perlindungan kedaulatan wilayah nasional, kesejahteraan dan keterhubungan, stabilitas kawasan dan global serta kapasitas nasional," jelas Menko Luhut.

Terkait perlindungan kedaulatan, Menko Kemaritiman Luhut mengatakan, "Indonesia adalah satu negara yang cukup besar sehingga tidak tergantung hanya pada kekuatan satu negara saja, entah Amerika atau Tiongkok. Jadi kita tidak akan pernah berpihak, kita akan tetap independen." Ketegasan sikap pemerintah ini menurut dia direfleksikan dalam konflik Laut China Selatan.

"Diplomasi kita sudah jelas, kita tidak ingin dikontrol oleh negara lain. *Sovereignty* (kedaulatan) harga mati," kata Menko Luhut dengan mimik serius. Ada beberapa hal yang ditekankan dalam upaya pemerintah untuk menegakkan kedaulatan maritim.

Hal pertama yang Menko Kemaritiman Luhut sampaikan adalah upaya diplomasi dalam penyelesaian batas-batas wilayah RI.

"Kita tidak ingin lagi kalah seperti kasus Sipadan dan Ligitan dahulu. Saya sudah bicara dengan Prof Hasjim juga bagaimana kita melakukan lobi, penanganan pulau-pulau yang mungkin belum terselesaikan," sebut Menko Luhut.

Selain itu, penguatan militer melalui penambahan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) menurut dia juga penting. "Alutsista kita juga tidak ingin lagi beli yang bekas, kita ingin semua brand new tapi dibuat dalam negeri," kata Menko. Namun demikian, dia mengakui bahwa untuk pembuatan pesawat terbang teknologinya masih memerlukan kerja sama dengan negara lain.

Kemudian, untuk mengontrol lalu lintas kapal-kapal asing di perairan Indonesia, Menko Kemaritiman Luhut mengatakan pemerintah kini memantau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Sekarang kita kontrol karena penting, kalau dulu tidak sehingga kita tidak bisa kontrol. Kita ngga tahu ada *submarine nuclear* atau kapal-kapal asing yang lewat. Tapi sekarang semua bisa kita pantau dengan alat yang dibuat oleh BPPT," tambah dia. Dengan alat itu pula, Menko Luhut menyebutkan adanya penemuan *drone* bawah laut milik asing.

Terakhir, Menko menuturkan tentang pengembangan Natuna sebagai sentra perikanan.

"Sekarang kami lagi kembangkan satu proyek di Laut Natuna Utara. Kita gunakan teknologi yang canggih, kita gunakan *drone* untuk nelayan ikan agar dapat melakukan penangkapan ikan disana," katanya. Untuk melengkapi hal tersebut, pemerintah juga akan membangun tanker untuk isi ulang kapal-kapal nelayan.

"Dengan demikian, kita bisa nikmatin hasil-hasil disana sehingga tidak ada lagi orang mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah *traditional fishing ground* lagi," pungkasnya. (**)



Seluruh Desa di Indonesia di Wilayah Terdepan dan Terisolir Harus Terang

Majalah Kemaritiman - Jakarta, Menurut data pemerintah pada tahun 2017 diketahui masih terdapat sekitar 1.698 desa yang belum teraliri listrik. Oleh karenanya Kemenko Kemaritiman yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dari empat kementerian dibawahnya, diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memiliki target di tahun 2018 untuk melistriki sebanyak 423 desa melalui jaringan listrik PLN dan 1.275 desa ditargetkan dapat diterangi melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Terdapat berbagai kendala yang berakibat pada sebagian desa di Indonesia masih gelap gulita dan belum dapat terlistriki oleh PLN, utamanya yang berada di wilayah terdepan dan terisolir. Pemerintah lalu bergerak cepat, Presiden Joko Widodo langsung menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2017 yang ditetapkan pada

tanggal 12 April Tahun 2017. Perpres itu mengatur tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan terisolir serta pulau-pulau terluar melalui percepatan penyediaan LTSHE yang dilaksanakan pemerintah tanpa memungut biaya sedikitpun dari masyarakat.

Pada beberapa kesempatan, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan, Indonesia memang harus segera mendiversifikasikan sumber energinya, dan tidak hanya bergantung dari listrik yang kebanyakan masih berbasis energi fosil seperti dari PLN. Indonesia, lanjut Menko Luhut wajib segera mengembangkan berbagai energi terbarukan (*renewable energy*) yang potensinya masih sangat besar

di Indonesia, dan salah satu yang harus dikembangkan adalah energi matahari sebesar 207.898 megawatt.

"Potensi kita di *renewable energy* sangatlah besar, namun pemanfaatan atau utilisasi kita masih rendah. Pengembangan teknologi *renewable energy* ini akan semakin pesat, ini dapat mendorong pengembangan energi terbarukan," ujar Menko Luhut di acara Pertamina Energi Forum yang digelar pada awal tahun ini.

Kembali kepada penerapan LTSHE di wilayah terdepan dan terisolir, Kemenko Bidang Kemaritiman segera bergerak untuk melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus melaksanakan peninjauan lapangan langsung.

Sebelumnya, Kemenko Bidang Kemaritiman bersama-sama instansi terkait lainnya di tingkat pusat telah membentuk Tim Monev implementasi Perpres RI Nomor 47 Tahun 2017 yang bertugas antara lain untuk, memastikan implementasi dari payung hukum tersebut, dan melakukan tugas lain terkait percepatan pengembangan energi terbarukan khususnya energi surya di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Agung Kuswando pun menyatakan, agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan efisien baik saat perencanaan, pengadaan, penyerahan sampai pasca pemberian bantuan LTSHE. Menurutnya, perlu keterlibatan semua pihak untuk memantau program ini agar tepat sasaran.

"Indonesia sudah 73 tahun merdeka, tetapi masih banyak desa yang belum teraliri listrik, program LTSHE menjadi percepatan agar desa-desa yang terpencil ini dapat menikmati penerangan yang baik," ujar Deputi Agung.

Kemenko Bidang Kemaritiman lantas mengadakan peninjauan lapangan, salah satunya adalah ke Desa Tanjung Padang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Menurut Asisten Deputi Bidang Energi dan Non Konvensional Amalyos, untuk Kabupaten Meranti sendiri sudah dibentuk Task Force untuk kembali menyalurkan bantuan LTSHE kepada KK penerima yang memang benar-benar membutuhkan.

"Akhirnya mereka dapat merasakan kehadiran negara di daerah ini, 73 tahun kita merdeka baru mereka merasakan secercah cahaya dan tidak lagi gelap gulita, itulah yang membuat harapan hidup mereka lebih panjang," jelasnya.

Kemudian, Kemenko Kemaritiman melalui Kedeputan Bidang Koordinasi SDA dan Jasa juga melakukan peninjauan lapangan penyaluran bantuan LTSHE ke Putussibau, Kalimantan Barat yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur.

LTSHE yang dibagikan dengan mode penerangan maksimal, dapat menyala selama 5 jam, untuk mode sedang bisa bertahan selama 11 jam. Sementara untuk mode redup dapat menyala hingga 47 jam *nonstop*. Setiap penerima mendapatkan 1 paket yang terdiri dari panel surya, 4 lampu dan 2 *remote control*. Setiap paket juga dilengkapi *barcode*, jadi setelah terdata, terverifikasi dan sudah dibagi sesuai dengan daerahnya serta tidak dapat ditukar atau dialihkan.

Kemenko Bidang Kemaritiman memandang, pada prinsipnya semua desa teraliri listrik. Saat ini baru diawali dengan LTSHE, lalu secara bertahap program listrik terus akan dikembangkan baik melalui program listrik desa, listrik mikrohidro, listrik piko atau diupayakan dapat melalui jaringan listrik PLN.

LTSHE sendiri adalah jawaban bagi desa-desa yang belum teraliri listrik PLN, paling tidak sampai dengan studi sumber pembangkit listrik permanen selesai, dan nantinya akan dipertimbangkan apakah akan dikombinasi antara Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan Panel Surya.

Data Kementerian ESDM menyebutkan, realisasi desa berlistrik tahun lalu mencapai 99,38 persen atau naik dari Tahun 2017 yang sebesar 97,1 persen. Pada tahun ini pemerintah pun akan menaikkan rasio elektrifikasi dari 98,3 persen pada tahun lalu jadi 99,9 persen.



Liputan

Majalah Kemaritiman – Jakarta. Rencana pemerintah untuk membuat jaringan pelabuhan terpadu dan terintegrasi di tujuh pelabuhan di Indonesia segera diimplementasikan. Salah satunya adalah dengan menggelar rapat koordinasi membahas konsep Jaringan Pelabuhan Terintegrasi/*Integrated Port Network* di Jakarta, Rabu (6-3-201).

Rakor yang diinisiasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman ini diikuti oleh beberapa pemangku kepentingan, antara lain dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Pelindo I, II, III, IV, INSA serta pakar profesional.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamiluddin yang memimpin rakor menyatakan pentingnya rakor tersebut untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait berbagai konsep dan perkembangan terkini terkait dengan pengelolaan pelabuhan, perdagangan dan juga sistem logistik nasional.

“Untuk membuat sistem logistik nasional yang efisien transportasi intermoda dan multimoda harus terkoneksi hingga ke pelabuhan rakyat dengan melakukan integrasi pembangunan *backbone* dan intermoda,” ujar Deputi Ridwan melanjutkan penjelasan tentang pentingnya pembangunan jaringan pelabuhan yang terintegrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ir. Wismana Adi Suryabrata mengusulkan konsep *Integrated Port Network* yang berdasar pada tiga pilar strategis.

“Yang paling penting adalah kita harus memiliki standarisasi infrastruktur, suprastruktur dan pola operasional di tujuh pelabuhan utama, integrasi kawasan industri dengan pelabuhan, dan membentuk aliansi pelayaran untuk efisiensi operasional jaringan pelayaran melalui peningkatan ukuran kapal dan aktivasi rute pendulum (*looping service*),” bebernya.

Implementasi *Integrated Port Network* (IPN) ini sendiri, menurutnya akan didasarkan pada sebuah Peraturan Presiden/Perpres.



Pemerintah Matangkan Rencana Pembangunan Jaringan Pelabuhan Terpadu

“Didalam Perpres tersebut akan dibentuk sebuah gugus tugas yang terdiri dari *steering committee* (terdiri dari elemen-elemen Pemerintah) dan *business committee* (perusahaan-perusahaan pelabuhan, pelayaran, dll),” tambah Deputi Wismana.

Lebih jauh, dalam kesempatan itu, Pelindo I, II, III dan IV sebagai pelaku di lapangan memberikan berbagai masukan teknis terkait dengan penurunan masa putar balik kapal, strategi pemanfaatan pelabuhan kecil sebagai pelabuhan pengumpan muatan balik yang membawa komoditas dari daerah terpencil melalui tol laut ke pelabuhan utama serta pengembangan pelabuhan nasional menjadi internasional berdasarkan kondisi alur.

Kesimpulan terakhir yang disepakati oleh peserta rakor, adalah pentingnya konektivitas sistem logistik nasional agar pertumbuhan perekonomian diluar Pulau Jawa dapat dipercepat.

“Sehingga dalam waktu dekat kita perlu segera memprioritaskan penyusunan standarisasi dan integrasi pelabuhan termasuk integrasi pelayaran,” pungkas Deputi Ridwan. Selain itu, disepakati pula untuk mempertimbangkan pengembangan pelabuhan yang terintegrasi di kawasan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II di bagian selatan.

Sebagai informasi, selain untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pertumbuhan

ekonomi di kawasan Indonesia timur, tujuan pemerintah untuk membangun jaringan pelabuhan terintegrasi untuk mengurangi dominasi Singapura yang selama ini menjadi pelabuhan penghubung internasional.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sendiri sebelumnya telah merinci tujuh pelabuhan yang akan disiapkan menjadi hub pelabuhan terintegrasi. Pelabuhan yang tersebar dari barat ke timur itu antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan (Sumatera Utara), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Jawa Timur), Kijing (Kalimantan Barat), Bitung (Sulawesi Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Sorong (Papua).



Ayo Indonesia Bangkit dengan Gerakan Masif Anti Sampah Plastik

Majalah Kemaritiman - Jakarta. Pemerintah Indonesia terus bergerak maju untuk memerangi sampah, utamanya sampah plastik. Upaya serius ini termasuk dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada Tahun 2025. Terbaru, beberapa waktu lalu atau tepatnya pada tanggal 11 Maret Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perindustrian bersinergi dalam sebuah Kemitraan Aksi Plastik Global atau *Global Action Plastic Partnership* (GPAP).

Untuk skala nasional sendiri, pemerintah langsung menggandeng kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil dan para *stake holder* yang berkepentingan dengan membentuk *National Plastic Action Partnership* (NPAP).

Kemitraan NPAP ini merupakan bentuk kemitraan antara publik-swasta yang dalam tingkat global telah diluncurkan tahun lalu di Davos, Swiss. Bertujuan untuk mengimplementasikan komitmen politis dan korporat mengenai penanggulangan

pencemaran plastik menjadi strategi yang terukur dan rencana aksi yang layak investasi.

“Dengan kolaborasi dan kerjasama tim yang kuat dengan Forum Ekonomi Dunia, kita akan dapat memobilisasi dukungan publik, sektor swasta dan masyarakat sehingga kita bisa melindungi anak dan cucu kita. Jika hal ini berhasil dan harus berhasil, maka anak dan cucu kita dapat menikmati hidup yang lebih baik tanpa sampah plastik” ujar Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan saat peluncuran GPAP di Jakarta.

Indonesia dipilih sebagai mitra pertama GPAP tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang juga sedang aktif dalam memerangi sampah, utamanya sampah plastik.

Permasalahan sampah di Indonesia sejatinya telah mencapai taraf mengkhawatirkan, oleh karenanya diperlukan suatu tindakan dan bukan hanya *lip service* tanpa adanya aksi nyata. Regulasi mengenai pengelolaan sampah telah diterbitkan sejak Tahun 2008,

yaitu UU Nomor 18 Tahun 2008, akan tetapi diakui atau tidak, aksi nyata perang terhadap sampah benar-benar dilakukan saat ini. Disebutkan dalam pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2018, antara lain tugas pemerintah dan pemerintah daerah adalah mengembakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman yang bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya terus menerus mendorong perubahan perilaku masyarakat dan industri di Indonesia secara sistematis. Yaitu dengan mengurangi kebocoran sampah di daratan dan juga lautan, promosi penelitian dan pengembangan untuk teknologi pengelolaan limbah, dan penegakan aturan hukum serta pengembangan inovasi pembiayaan untuk pengelolaan limbah.

Kemudian salah satu langkah nyatanya adalah, *progress* revitalisasi Sungai Citarum, yang sampai dengan beberapa bulan yang lalu masih dikenal sebagai sungai terkotor di dunia, namun saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik. Bahkan, proses pengerjaan revitalisasi Sungai Citarum bisa diselesaikan dalam tempo lebih cepat dua tahun dari target awal.

Kemenko Kemaritiman sudah pasti menjadi salah satu aspek penting dalam ‘perang’ terhadap sampah, yaitu sebagai koordinator dalam satu gerakan massif lainnya, yaitu Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dimana aksi nyata ini termasuk dalam Gerakan nasional Revolusi Mental (GNRM), sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016.

Seperti yang dikatakan oleh Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanudin, bahwasanya GNRM ini harus dijalankan sehingga bagaimana K/L terkait dan semua pihak dapat terlibat dalam pengelolaan sampah berdasarkan tujuh fokus GIB.

“di antaranya program peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, program pengembangan sistem pengelolaan sampah serta program peningkatan hukum,” jelas Deputy Safri saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Saat ini salah satu kota yang dinilai sukses dalam penanggulangan sampah plastik adalah Banjarmasin, dimana kota terbesar di Kalimantan Selatan tersebut telah sukses menerapkan larangan penggunaan

kantong plastik di sekitar 130 pusat perbelanjaan modern disana.

Yang perlu digaris bawahi adalah, penuntasan permasalahan sampah bukan hanya pekerjaan satu instansi saja, akan tetapi merupakan tugas bersama.

“Ini bukan pekerjaan satu pihak saja, ini adalah tugas mulia kita bersama, kalau kita kompak kita pasti bisa dan kalau kita tidak berbuat apa-apa, saya kira kita sudah ikut andil dalam menciptakan generasi Indonesia minim kualitas dan *stunting* (kuntet),” ujar Menko Luhut saat Raker GIB di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum lama ini.





SUKSESKAN PEMILU

17
April 2019



Agung Kuswandono
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
Kemenko Bidang Kemaritiman

Deputi Agung Saya Punya Mimpi Besar Menghilangkan Stunting

Majalah Kemaritiman - Jakarta. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, salah satunya melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, dipandang sangat *concern* untuk mencegah generasi mendatang mengalami kondisi *stunting* dan kurang gizi. Diantara cara yang paling baik adalah pemenuhan gizi masyarakat yang dimulai sejak saat ini, yakni dengan mendorong budaya gemar makanan laut dan aktif menjaga lingkungan laut serta pesisir.

Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Kemaritiman, Agung Kuswandono lantas menjelaskan berbagai program yang sedang dan sudah dikerjakan oleh Kedeputian di bawah komandonya tersebut. Dan berikut adalah petikan wawancara yang dilakukan oleh Tim Majalah Kemaritiman, dengan mantan Dirjen Bea dan Cukai yang dikenal hangat dan murah senyum tersebut.

Program kerja Bapak, salah satunya membahas tentang *stunting*, apa sih *stunting* itu menurut pengertian Bapak?

Stunting adalah kondisi dimana anak-anak yang kekurangan gizi mengalami kondisi kuntet (bertubuh pendek/cebol), karena gizinya kurang pun kecerdasannya pun akan berkurang. Bayangkan kalau anak bangsa kita mengalami kondisi seperti itu, maka negeri kita akan mengalami bahaya yang sangat besar, dimana teknologi akan semakin tinggi dan kecerdasan akan semakin tinggi, namun ada bahaya lain yaitu *stunting*. Oleh karenanya mulai saat ini harus kita antisipasi agar *stunting* ini tidak terjadi, jadi kita tidak usah meributkan ada atau tidaknya *stunting*, akan tetapi yang jelas potensinya ada dan potensi itu yang harus kita hilangkan.

Kenapa pemerintahan sangat *concern* dengan masalah ini?

Pemerintahan sekarang saya lihat sangat-sangat *concern* dengan anak-cucu kita sang penerus bangsa, karena kalau generasi yang nantinya akan memegang tongkat estafet dari kita, tetapi tingkat kecerdasannya kurang, maka kemampuan dan kepemimpinannya juga lebih rendah, maka kita akan menghadapi kondisi yang sangat berat nantinya, akibatnya kita akan ditekan oleh negara-negara lain. Makanya potensi generasi masa depan ini wajib kita jaga. Salah satunya kita harus hilangkan potensi terjadinya *stunting* ini.

Sekarang pertanyaannya? Bagaimana cara menghilangkannya? Apakah Bapak bisa menjelaskan?

Salah satunya ada di perikanan, kita punya sumber daya ikan yang luar biasa besar, namun sampai sekarang belum kita optimalkan. Sebenarnya ada acara yang baik, yaitu ikan-ikan ini akan kita olah, dan pengolahannya bisa kita ubah menjadi tepung ikan, sehingga kualitas tetap terjaga, kandungan vitamin tetap akan tetapi penyimpanan bisa lebih lama, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tepung ikan ini bisa dijadikan berbagai macam panganan dan dapat didistribusikan ke wilayah manapun tanpa takut rusak di perjalanan. Intinya semua masyarakat baik di pantai ataupun gunung-gunung sekalipun dapat memperoleh manfaat protein dari produk turunan ikan ini. Masih perlu ada dorongan lebih dari pemerintah, nanti rencananya kami dari tingkat PAUD

sampai dengan SMA bila perlu makan siangnya wajib menggunakan olahan ikan ini, ini akan menjadi industri baru apabila pemerintah mau masuk ke sini.

Kedeputan Bidang Koordinasi SDA dan Jasa berarti sangat *concern* dengan isu *stunting* ini, jadi manfaat tepung ikan tadi, apakah merupakan jawaban?

Itu jawaban, dan sekaligus saya ingin hal itu menjadi isu nasional.

Apakah ada solusi lain untuk menghilangkan potensi *stunting* ini?

Masalah *stunting* ini sebenarnya adalah masalah ekonomi, banyak anak-anak yang belum mendapatkan gizi baik karena kondisi keuangan dari orang tuanya. Selain kita harus menyentuh terhadap masalah gizinya tadi, kita juga harus menyentuh tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat kita yang ekonominya masih di bawah? Kami di Kemenko Kemaritiman fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan, kami upayakan berbagai macam cara, salah satunya bila mereka hendak melaut, pasti mereka perlu biaya, dan sekarang dengan bekerjasama dengan Kementerian ESDM, saat ini sedang melakukan program konversi dari BBM (Bahan Bakar Minyak) ke BBG (Bahan Bakar Gas), dengan menggunakan *converter kit*, apabila itu diterapkan nelayan, hal itu bisa mengurangi *cost* nelayan sampai dengan setengah, otomatis beban mereka untuk melaut menjadi semakin lebih kecil. Kemudian disiapkan juga tempat penyimpanan atau *cold storage* untuk menyimpan ikan hasil tangkapan nelayan yang belum sempat terjual. Lalu, perlu dihubungkan si nelayan dengan pengusaha perikanan dari berbagai level. Ternyata banyak aspek untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Mengenai perikanan budidaya yang juga sangat potensial, bagaimana tanggapan Bapak?

Nah, jadi di level pusat kita juga berpikir bagaimana caranya mengangkat nelayan-nelayan tersebut, salah satunya mengajak nelayan untuk melakukan perikanan

budidaya, kita persiapkan dan mendidik mereka untuk melakukan perikanan budidaya. Untuk mengembangkan tempat pembudidayaan ikan ini juga harus disiapkan dan itu adalah di hutan *mangrove* sebagai *nursery ground* (tempat perkembangbiakan ikan).

Mangrove ini menarik Pak, bisa diceritakan kondisi hutan *mangrove* kita?

Mangrove kita 52 persen hilang, untuk itulah kita di Kedeputan II diberikan tugas merehabilitasi hutan *mangrove* seluruh Indonesia. Jadi *mangrove* ini selain ditujukan untuk perikanan juga untuk mitigasi bencana karena fungsi *mangrove* yang bisa menahan tsunami, karena pernah ada investigasi di daerah Palu yang tertimpa bencana tsunami, tetapi karena dibentengi oleh hutan *mangrove* dan desa tersebut aman dari terjangan. Jadi sebetulnya yang kita lakukan ini sangat mendasar, tetapi ada saja masalahnya.

Boleh dijelaskan masalah apa saja Pak?

Hal yang sangat *basic* dan *strategic* ini kurang laku diberitakan di media, jadi media kurang suka bahas isu-isu ini, kalau kita biarkan maka yah tidak akan ada yang usik, yang mengangkat beritanya hanya satu-dua saja, bahkan cuma hari minggu saja keluarnya, ini yang harus kita ubah dan harus kita jadikan satu pemikiran besar. Misalnya saja, peta laut Indonesia belum tersedia secara optimal, namun kalau peta darat sampai ke daerah terpencil sudah ada, namun peta laut belum ada, jadi kalau tiba-tiba ada masalah, entah *oil spill* atau kecelakaan kapal, tentu penanganan akan lebih sulit karena peta yang tidak ada dan navigasinya yang tidak jelas, pada akhirnya tentu akan mempersulit.

Kembali ke masalah *stunting*, koordinasi dengan Kementerian lain sudah seperti apa Pak?

Jadi seperti ini, kita ini ada beberapa institusi, akan tetapi kita seakan masih jalan sendiri-sendiri. Masing-masing institusi kan punya anggaran, jadi relatif mereka hanya sibuk dengan anggaran masing-masing, padahal kalau dikumpulkan se-Indonesia, anggaran itu besar sekali. Kita di Kemenko Kemaritiman sering juga mengundang

institusi lain di bawah koordinasi kita, karena hanya dengan itu maka terbangun kesepahaman dan koordinasi yang baik, contoh kembali ke *mangrove* tadi, ada dua institusi yang *concern* ke masalah itu, ada KLHK untuk *mangrove* di darat dan KKP untuk *mangrove* yang menjorok ke laut, nah itu bagaimana? Jadi akhirnya mereka sibuk mengurus pekerjaannya masing-masing. Makanya sekarang kita kumpulkan semua *database* se-Indonesia, kita jadikan satu dan kita tidak hanya undang unsur pemerintah namun juga unsur swasta, NGO dan juga akademisi. Jadi kalau ada peneliti asing atau orang luar negeri yang kesini, mereka tidak bisa mendikte kita, sebab hanya kita yang tahu masalah kita sendiri dan juga oleh sebab teknologi yang mereka bawa belum tentu juga cocok dengan kita.

Terakhir Pak, harapan Bapak mengenai permasalahan *stunting* di Indonesia ini akan seperti apa?

Saya mempunyai mimpi besar akan menghilangkan *stunting* di Indonesia, dan saya siap bekerja keras untuk membangun mimpi itu, dari hal yang paling dasar. Sekarang ini kita sedang bekerja sama dengan satu perusahaan di Kepulauan Riau, dan ini yang bangun anak-anak muda untuk mengolah ikan menjadi tepung ikan, dan hasil tepung ikan ini ada yang dibuat mie instan dan lainnya. Dan ini sudah mulai dilirik oleh perusahaan besar. Teknologinya sangat sederhana dan bisa dikloning ke daerah lain dan masyarakat bisa bergerak dari situ, pangsa pasar juga luar biasa besar. Untuk makanan ternak juga sangat potensial, karena 80% makanan ternak kita kan masih impor, kalau bisa disuplai dari situ kan luar biasa. Prinsip utamanya, mengerjakan segala sesuatunya kita memang harus bersatu, menuntaskan masalah *stunting* itu sebetulnya poin kecil, akan tetapi mengerjakan segala masalah di Indonesia kita harus bersatu. Intinya koordinasi penting dan koordinasi itu merupakan barang langka di Indonesia.



Implementasi Nilai PATEN Menjadikan Indonesia yang Terbaik

Majalah Kemaritiman - Jakarta, Berdasarkan hasil rekomendasi atas evaluasi implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017, Kementerian PAN & RB budaya kerja "PATEN" dari Kemenko Bidang Kemaritiman, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 67 Tahun 2018 tentang Implementasi Budaya Kerja *Passion, Accountable, Teamwork, Efficient/Effective, dan Networking* di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dalam rangka membangun *mind set dan culture set* PATEN tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman

bekerjasama dengan Tim ESQ melaksanakan Workshop Internalisasi Nilai PATEN. Workshop ini melibatkan 102 pegawai mulai dari struktural hingga fungsional yang berasal dari 24 unit Eselon II dilingkup Kemenko Bidang Kemaritiman dan dibagi dalam dua Batch yaitu tanggal 26 dan 27 Februari Tahun 2019 di Menara 165, Jakarta.

Workshop Internalisasi Budaya Kerja Organisasi "PATEN" bertujuan agar pegawai mengetahui nilai-nilai budaya kerja organisasi dan mampu mengimplementasikannya. Para Peserta *workshop* diharapkan bisa menjadi *agent of change* pada unit kerja masing-masing, sehingga penguatan dan

implementasi reformasi birokrasi lebih cepat dan nyata di Kemenko Bidang Kemaritiman. Hal ini karena Implementasi budaya kerja PATEN tidak cukup dengan hanya slogan dan simbol, namun perlunya dilakukan upaya-upaya melalui pelatihan dan penetapan target terukur untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan serta monitoring secara berkala dengan membangun *mind set dan culture set*.

"Jadi saya berharap ini semua bisa ditularkan, bukan hanya di lingkungan kerja kita, tapi juga di lingkungan keluarga kita, karena yang paling penting adalah kita menghargai orang tua," kata Agus Purwoto, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Nilai-nilai PATEN ini perlu ditanamkan kepada para ASN memasuki VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) Era, di mana perubahan terjadi dengan cepat secara makro di dunia dan tidak ada lagi kepastian dan ketidakpastian menjadi hal yang normal sekarang. Oleh karena itu implementasi nilai PATEN di lingkungan kerja masing-masing sangat penting.

"VUCA adalah era yang disruptive dan era digital, dan sudah sampai pada era 5.0. Pertanyaannya leadership seperti apakah yg dibutuhkan untuk menghadapi era seperti ini. kecepatan perubahan dan teknologi sudah seperti Ferrari, sementara kondisi kita saat ini seperti masih mengendarai Karimun. Di era 5.0 kita harus mampu menghadapi persaingan, khususnya dalam hal *leadership*," kata Ary Ginanjar Agustian, ESQ *Leadership Center*.

Workshop yang bekerja sama dengan ESQ *Leadership Center* ini dibuka dengan perkenalan antar peserta dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Bram Wibisono, salah satu trainer dari ESQ. Peserta melakukan aktivitas seperti pelatihan, diskusi, dan permainan untuk peserta melatih nilai-nilai PATEN dalam diri mereka. Peserta dibagi per kedeputian atau biro, kemudian melakukan diskusi studi kasus dalam kelompok yang telah dibagi satu nilai dari PATEN lalu wakil dari

masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusinya.

Peserta juga diajak melakukan perjalanan keluar dari pemikiran egosentris guna membangun pemikiran yang holistik. Hal ini karena dalam hubungan dengan pekerjaan, akan memberikan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sebuah tim, tim adalah bagian dari organisasi, dan organisasi adalah bagian dari bangsa, dan bangsa adalah bagian dari semesta.

"Apapun posisi anda sekarang, cara berpikir anda harus besar yakni berpikir untuk kepentingan Negara Indonesia, berpikirlah bahwa anda akan menjadi pemimpin dan bagaimana anda dapat mengembangkan Indonesia. Dan hilangkan sifat pesimis karena Indonesia akan menjadi *the best* dan Anda harus siap menjadi bagian dari *the best* itu," kata Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.





Pembekalan Teknis Anggaran Guna Keseragaman

Majalah Kemaritiman - Jakarta, menyeragamkan data anggaran dari seluruh ke deputian dan biro, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melaksanakan bimbingan teknis penyusunan anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA - K/L) pada hari Kamis-Jumat, (28 Februari - 1 Maret 2019) di Bogor. Peserta yang sebagian besar merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan dibekali terkait instalasi dan pengenalan fitur aplikasi RKA-K/L, teknik penyusunan anggaran, cara entri detail data anggaran, dan dilanjutkan simulasi penyusunan anggaran.

"Penyusunan (anggaran dan RKA-K/L) ini diharapkan menjadi kompetensi dasar kalian (CPNS)," kata Plh. Kepala Biro Perencanaan, Bambang Herunadi mengawali acara dengan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi.

Adanya bimbingan ini menjadi bekal bagi CPNS dalam membantu penyusunan anggaran dan RKA-K/L, sehingga keseragaman data anggaran mulai dari struktur kegiatan, penggunaan komponen, sub komponen, penggunaan SBM, penulisan detail rincian anggaran; konsistensi perencanaan dan realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan lain seperti SIRUP, Laporan LAKIP, Laporan SAKIP, BSC, penganggaran berbasis Gender/Kinerja, RANHAM, *Tagging* Anggaran, serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efisien, tepat waktu dan akuntabel.

Pembekalan terkait anggaran ini sangat diperlukan karena belum adanya pedoman penyusunan dan revisi anggaran; kurangnya SDM yang memahami proses penganggaran; minimnya koordinasi antara para operator RKA-K/L dalam menyusun anggaran; perbedaan persepsi masing-masing unit kerja dalam menyusun anggaran; kurangnya pengetahuan dan pengalaman personil dalam menggunakan aplikasi RKA-K/L, sehingga muncul beberapa masalah, seperti pagu minus; ketidakseragaman data anggaran misalnya penggunaan satuan (OK, OH, Orkal dan Paket), SBM, penggunaan akun belanja (BAS), penulisan detail rincian anggaran dan

penentuan standar komposisi belanja; revisi anggaran khususnya revisi POK yang terlalu sering; koordinasi yang belum teratur.

Selain materi teknis terkait aplikasi dari RKA-K/L itu sendiri, dihadirkan pula pemateri dari Kementerian Keuangan. Pertama, dijelaskan oleh Uud Ahmad dari Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan tentang sistem aplikasi, mekanisme penelaahan online, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Kedua, Nur Abdul Haris dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyampaikan materi tentang Bagan Akun Standar. Ia menjelaskan latar belakang adanya restrukturisasi akun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena Jenis PNBP yang memiliki realisasi besar masih tergabung dengan jenis PNBP lainnya dalam satu akun sehingga kurang informatif khususnya untuk pemaparan di level pimpinan (Menteri & DPR); Banyak Akun yang memiliki realisasi tidak signifikan atau tidak ada realisasi sama sekali selama beberapa periode sehingga perlu dihapus untuk efektifitas pemanfaatan dan informasi akun; Beberapa Akun seharusnya dihapus karena sudah tidak sesuai ketentuan terkini; Pengelompokan Akun PNBP (4/5 Digit Akun) belum memberikan karakteristik yang jelas atas jenis PNBP yang masuk pada kelompok akun tersebut.

Selain itu, dilakukan juga pendistribusian aplikasi RKA-K/L Tahun 2019 dan disosialisasikan aplikasi serta pengenalan singkat terkait fitur-fitur dalam aplikasi. Dilanjutkan dengan simulasi entri data dengan data yang sudah disiapkan oleh panitia per biro atau ke deputian. Kemudian, diperiksa kelengkapan entri data oleh panitia per kelompok sambil *review* kembali tahap-tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini untuk semakin menyakinkan bahwa peserta telah memahami cara penggunaan dari aplikasi RKA-K/L tersebut.



Hamish Daud Sudah Tidak Zaman Buang Sampah Sembarangan!

Majalah Kemaritiman - Jakarta, Kantor Kemenko Kemaritiman kehadiran seorang *public figure* dan juga penggiat lingkungan yang sangat aktif dalam mengkampanyekan gerakan cinta lingkungan, utamanya cinta laut. Adalah Hamish Willie Daud yang hadir untuk bertemu sekaligus berdiskusi dengan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengenai segala hal seputar lingkungan hidup dan kemaritiman. Pasca perbincangan hangat tersebut, tim Majalah Kemaritiman kemudian berkesempatan untuk mewawancarai langsung artis yang baru saja menjadi ayah dari pernikahannya dengan penyanyi Raisa tersebut. Wawancara berlangsung santai namun tetap berfokus pada isu seputar lingkungan hidup. Dan berikut adalah kutipan wawancara yang berlangsung pada Jumat (1/3/2019).

Apa kabar anda? Kabar keluarga kecil anda? Terutama dengan kehadiran sang anak?

Baik, Alhamdulillah dan terima kasih sudah menanyakan. Alhamdulillah, senang sekali, saya selalu begadang dan sudah dua minggu ni begadang dengan senang hati. Tapi yah, saya sangat bahagia dengan segala yang saya alami dan dengan segala prosesnya

Untuk aktifitas anda belakangan ini apa saja yang sering dilakukan? Khususnya di bidang lingkungan?

Saya kilas balik terlebih dahulu, saya sebenarnya dari kecil sudah mulai memperhatikan lingkungan. Saya besar di Sumba NTT dan Bali, sejak umur 3 tahun saya sudah berenang di laut bersama Hiu Paus dan Pari Manta, saya sudah pernah lihat keindahan lautan kita sejak 33 tahun yang lalu, ternyata sudah seusia itu yah aku (sambil tertawa).

Saya sudah melihat keindahan dari Hiu Paus dan dari spesies-spesies yang sudah hampir punah, saya juga sudah lihat di saat ini lautan yang sudah sangat berubah. Kalau dalam bahasa inggris "*I have seen the beauty and I have seen the devastation*", dan saya tidak mau terlibat di generasi yang merusakkan semua buat anak saya.

Kembali ke pertanyaan awal, sudah 5 tahun ini saya mengumpulkan kawan-kawan saya yang professional dan ahli di bidangnya seperti dari *marine biologic* dan bidang lain untuk kita bekerja bersama untuk membantu lautan Indonesia.

Menurut studi yang dilakukan oleh Jenna Jambeck tahun 2016 kita berada di peringkat ke 2 setelah Tiongkok sebagai penyumbang sampah laut terbesar, dan Pemerintah pun sedang bergerak untuk memerangi masalah sampah, dari kacamata anda, progress seperti apa yang sudah pemerintah lakukan?

Sudah beberapa tahun kita selalu menggaungkan untuk jangan buang sampah sembarangan, menjaga lautan dan lain sebagainya akan tetapi hal itu tetap sulit apabila tidak ada bantuan dari pemerintah dan kementerian yang terkait. Namun saya dengan senang hati bisa bilang kalau kita semua saat ini sudah mulai bergerak. Baru saja tadi saya berdiskusi dengan Pak Luhut dan *planning* beliau untuk membersihkan laut kita dari sampah menurut saya itu sudah senada dengan kita semua. Kita sudah banyak mendapatkan perhatian dari luar negeri, kita adalah peringkat 2 penyumbang sampah terbesar di dunia padahal

penduduk kita hanya 265 juta, saya sampai ke India yang berpenduduk 1,4 miliar, tetapi yah saya akui lautan kita lebih kotor.

Tetapi yang terpenting adalah sekarang kita sudah mulai tahu, masyarakat juga sudah banyak yang mulai sadar. Kita adalah negara dengan jiwa patriot yang sangat tinggi, negara ini sangat *passionate* apalagi setelah kita banyak tahu kalau kita sedang darurat sampah, akhirnya banyak orang yang sudah mulai tergerak dan semakin banyak yang malu untuk buang sampah sembarangan.

Saya senang sekali kalau sekarang trennya sudah mulai jalan, banyak orang yang ingin membantu gerakan hidup bersih dan semakin banyak orang yang berpikir kalau sudah tidak jaman untuk buang sampah sembarangan.

Banyak orang hidup masih di bawah standar, mereka ini biasanya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah sampah, karena kebanyakan waktu mereka sudah disibukkan dengan hal lain. Namun sekarang adalah waktunya untuk merubah pola pikir dan mulai mencintai alam kita.

Mengenai Indonesian Ocean Pride, bisa dijelaskan sedikit mengenai hal itu?

Ini adalah gerakan, baru dianggap bulan ini di Indonesia namun sudah cukup banyak mendapatkan perhatian karena sudah berani untuk menjadi narasumber di kampus-kampus. Ini sebenarnya adalah ide kita sejak 5 tahun lalu, saat kita sedang melakukan riset di Papua Barat untuk Penyu Belimbing dan Hiu Paus serta Pari Manta bersama-sama dengan tim saya. Saat itu terlintas di benak saya bahwa saya saat itu berada bersama dengan orang-orang hebat dan berpengalaman di bidang kemaritiman, akan tetapi saat itu tidak ada yang tahu. Dan akhirnya maka teretuslah gagasan bahwa kita semua harus bergabung demi masyarakat dan demi Indonesia.

Tujuan dari pembentukan NGO Indonesian Ocean Pride ?

Untuk mengembalikan lagi hati dan pikiran kita untuk kembali ke laut. Karena apa? Karena kita itu sejatinya adalah negara maritim dan sekarang sudah banyak orang yang melupakan hakikat kita sebagai bangsa samudera,

contohnya yah orang-orang masih banyak sekali yang membuang sampah sembarangan di darat dan bermuara di laut.

Intinya yang kita pakai dalam gerakan ini adalah pendekatan intelektual dan bukan sekedar demonstrasi di acara *car free day*. Kita ingin perkenalkan lagi laut kita melalui Pendidikan dan program-program yang orang lain bisa ikut campur.

Terakhir, pesan anda kepada generasi muda millennial sekarang?

Pertanyaan yang sederhana tetapi cukup sulit dijawab. Untuk kalian semua, ekspektasi saya kepada kalian semua tidak panjang lebar. Mungkin harapan saya adalah adanya sedikit perubahan in *lifestyle and attitude*, satu orang tidak bisa membuat perubahan sekejap, tetapi setiap orang bisa sedikit melakukan perubahan semisal jangan kita menggunakan lagi *single use plastic*.

Jangan lagi memakai kantong kresek, sekarang di rumah saya kita mengkoleksi *bag-bag* untuk belanja yang dapat kita gunakan berulang-ulang, jangan juga menerima sedotan kalau di restoran dan belilah sedotan *stainless steel* untuk kita pakai, jangan lagi membuang sampah sembarangan karena itu sudah tidak jaman, walaupun tidak ada tempat sampah tapi kantong saja terlebih dulu.

Kita juga harus berikan contoh kepada generasi selanjutnya, apalagi kalau yang sudah punya anak *be a good example*. Dimulai dari hal terkecil saja dahulu, saya ga meminta untuk demo di Bundaran HI atau hal sejenisnya, berubahlah dan kita buktikan kalau kita memang sangat cinta Indonesia.



Explore !



Jembatan Gantung Situgunung

Majalah Kemaritiman - Sukabumi. Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan meresmikan Jembatan Gantung Situgunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (9/3).

"Terimakasih Situgunung *Suspension Bridge* ini telah dikerjakan dengan bagus dan terimakasih juga kepada Kementerian LHK, PT Fontis Aquam Vivam yang merupakan badan usaha swasta yang jalan," sambut Menko Luhut di lokasi acara.

Jembatan kebanggaan warga Sukabumi ini memiliki panjang 243 meter dan lebar 1,2 meter, yang menjadikannya sebagai Jembatan Gantung terpanjang di Asia Tenggara.

Sementara untuk jembatan gantung terpanjang dan terbesar di Asia sendiri berada di Tiongkok, berdiri di atas Sungai Longjiang di Provinsi Yunnan. Panjang jembatan tersebut sekitar 2,4 kilometer dengan ketinggian 280 meter dari atas permukaan Sungai Longjiang. Sebelum akhirnya rekor tersebut dikalahkan oleh *Pearl Bridge* di Jepang yang merupakan jembatan gantung terpanjang di dunia dan secara otomatis juga menjadi terpanjang di Asia, yakni sekitar 3,9 kilometer. Dan untuk jembatan gantung tertinggi di dunia berada di Millau Viaduct, Perancis dengan ketinggian mencapai 343 meter dari permukaan tanah.

Situ Gunung *Suspension Bridge* dapat menampung berat dengan beban 55 ton atau sekitar 150 orang. Dan diperkirakan hanya bisa menampung 60 orang yang dapat naik dalam waktu bersamaan. Namun pada kenyataannya jembatan gantung ini hanya boleh dilintasi oleh 40 pengunjung saja dalam sekali menyeberang.

Jembatan gantung ini menggunakan bahan dasar berbahan kayu ulin yang dikirim dari Provinsi Papua. Ulin atau juga yang disebut kayu besi merupakan pohon khas dari daerah Kalimantan.

Spesifikasi kayu besi ini tahan terhadap perubahan suhu, dan kelembaban,

sehingga sifat kayunya sangat berat dan keras. Ulin tumbuh dengan berbagai keistimewaan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh kayu-kayu lain. Kayunya yang mampu melebar dengan diameter yang besar, tapi juga cukup tinggi, serta memiliki sifat yang sangat keras dan juga tidak mudah dimakan rayap.

Jembatan gantung ini juga menggunakan 5 *sling* sekaligus, jika pada umumnya jembatan gantung hanya menggunakan 3 *sling* saja. Selain itu untuk pengaman jembatan gantung juga telah dipasang jaring kawat A dengan ukuran 4 mm dengan tinggi 120 meter, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keamanan pengunjungnya.

Pembangunan jembatan gantung ini atas prakarsa pihak swasta dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dana yang dikeluarkan tak tanggung-tanggung, sejak bulan Mei Tahun 2017 tercatat dana yang sudah keluar lebih dari Rp 4 milyar.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami lantas mengatakan, jembatan gantung ini diharapkan kelak akan menjadi ikon wisata alam kebanggaan warga Sukabumi dan Indonesia pada umumnya.

"Sebelum diresmikan, jembatan gantung ini sudah *viral*. Semoga dengan diresmikannya jembatan gantung ini dapat lebih menarik minat masyarakat untuk mengunjungi Sukabumi dan merasakan sensasi menikmati keindahan dan kesegaran alam khas kaki gunung Gede-Pangrango dengan melintas di Jembatan Gantung ini," ujar Bupati Marwan.

Pemerintah mendukung pembangunan obyek wisata seperti jembatan gantung tersebut karena sejalan target untuk menjadikan pariwisata sebagai pemberi sumbangan devisa negara terbesar.

(Dikutip dari berbagai sumber).



Banjir Bandang

Karya : Joko Rehutomo

"Ya Allah, kapan masalah ini akan selesai?!" teriak Hindun ketika tengah malam mendapati air telah mengepung kamarnya. Hujan deras yang turun sedari tadi sore membuat air sungai meluap. Diperparah dengan saluran got yang mampat, membuat kampung padat penduduk di tengah ibukota itu menjadi langganan banjir saban tahun.

Kedua mata Hindun yang separuh mengatup, mendadak terbuka lebar. Ia singsingkan ujung daster bagian bawah, dan tergesa beranjak ke kamar sebelah. Air menggenang sampai mata kaki, menjelajah seantero ruangan rumah petak.

Berkecipak, ketika telapak kaki perempuan berambut sebauh itu melangkah. Tak dipedulikannya dingin air yang menelusup. Dilihatnya, Dodo, anak lelaki semata wayangnya tengah tertidur pulas.

"Do...Do, bangun! Banjir datang nih!" teriaknya, berharap bocah kelas lima SD itu segera membuka mata.

"Bangun cepat, Do! Rumah mau tenggelam!" teriaknya ulang, setengah kesal. Tak ada reaksi dari Dodo, tetap bergeming. Dengan cemas, tangannya menggoyang-nggoyang tubuh kecil yang sedang meringkuk itu. Ditariknya sarung usang yang menyelimuti.

Hati Hindun langsung mencelos ketika menyentuh badan Dodo. Reflek dirabanya leher berlanjut ke ubun-ubun. Serasa telapak tangannya menyentuh bara.

"Aduh, panas sekali badanmu Do..." gumamnya panik. Dilihatnya jam di dinding, jarum pendek mengarah ke angka sebelas.

"Gimana ini...Bapakmu jaga malam lagi," roman Hindun tersaput gelisah.

Gegas ia kembali ke kamarnya. Air bertambah tinggi, keruh kecoklatan. Serpihan sampah dedaunan dan plastik mengambang, terbawa ke dalam rumah. Kakinya mulai terasa gatal-gatal. Diambilnya handphone. Jari gemuk itu dengan cekatan memencet nomor sang suami. Beberapa jenak menunggu jawaban, hanya suara operator yang terdengar. Mewartakan kalau nomor bersangkutan tak bisa dihubungi.

"Pasti hape Bang Kohar ngedrop. Kebiasaan deh..." gerutu Hindun. Dicobanya ulang, nihil. Dengan muka keruh dimasukkannya *handphone* ke saku daster. Sembari menuju dapur, ia berharap Kohar lekas mencharge battery dan menelepon balik.

"Busyet! Apaan tuh...?!" perempuan gempal itu berteriak spontan. Tampak seekor tikus wirog, sebesar anak kucing menggapai-nggapai berusaha merayap di tembok. Deburan arus air yang semakin deras kembali menyeret si wirog. Sekujur bulunya kuyup tercebur air.

Hindun mencoba mengusir dengan gagang sapu. "Hush...hush! Pergi...!" Si wirog berusaha menghindari. Ketika hendak dipukul, reflek binatang pengerat itu melompat. Gagang sapu luput dari sasaran, memukul air dengan keras. Air keruh pun memercik mengenai wajah.

"Sontoloyo!" Hindun mengumpat pendek. Diusapnya wajah yang basah. Si wirog telah melarikan diri entah ke mana. Gegas ia menuju meja dapur. Dituangnya air panas dari termos, sisa membuat kopi Kohar ke dalam rantang. Lalu dicampurnya dengan air dingin, hingga air menjadi hangat kuku. Beruntung Hindun mempunyai kebiasaan menampung air bersih dalam ember besar untuk keperluan memasak. Jadi saat banjir datang seperti ini ia tak terlampaui khawatir. Minimal untuk dua hari kedepan masih punya persediaan.

Sembari terus merapal doa, berharap banjir lekas surut. Kalau tidak, ia tak tahu mesti kemana harus meminta air bersih. Haruskah ia memakai air banjir untuk memasak? Hindun bergidik ketika membayangkan air keruh kecoklatan itu mengalir tenggorokan. Perutnya pun mendadak mual.

"Do, Emak kompres dulu, ya...Biar panasnya cepat turun," tutur Hindun lembut.

Untuk saat ini, hanya mengompres tindakan yang bisa dilakukannya. Tak ada persediaan obat untuk diminum. Selama ini, Hindun membeli obat jika diri dan keluarganya merasa benar-benar sakit dan menjadi bayang pembaringan. Diperasnya sapu tangan yang telah dicelup air dan meletakkannya di dahi Dodo. Meski sehari-hari galak, tapi sifat keibuannya merimbun tatkala anak lelakinya lemah tak berdaya seperti itu.

Setengah jam berselang, suhu tubuh Dodo tak jua mereda. Beberapa kali Hindun mengganti kompres yang mengering. "Kok, belum turun-turun juga ya, Do..." keluhnya khawatir. Tampak wajah Dodo semakin pasi.

"Kamu harus segera minum obat, Do..." putus Hindun.

"Tapi tengah malam gini mana ada apotek atau toko obat yang buka, ya?" kepala Hindun semakin pening. Perempuan itu tak tahu mesti apa yang diperbuat lagi.

"Pak...Pak...sakit, Pak..." Dodo mulai meracau. Bocah lelaki itu memanggil-manggil bapaknya dengan bibir gemetar.

"L...ini...Mak, Do. Emak ada di sini..." Hindun meraba dahi Dodo. Bara itu semakin menjadi. "Apanya yang sakit?"

"Sa...sa...kit, Pak..." Dodo tetap memanggil bapaknya. Perasaan nelangsa mencuat di dada Hindun.

Sebagai seorang ibu, ia merasa terabaikan. Selama ini, Dodo memang lebih dekat dengan bapaknya. Kohar, lelaki pendiam itu tak pernah marah bila Dodo melakukan kenakalan khas anak-anak. Lain halnya dengan Hindun. Ia kadang gemas bila melihat anaknya pulang sekolah terlambat dengan seragam berlepotan lumpur. Atau malamnya tak mau belajar karena kecapekan bermain bola. Tak pelak cubitan kecil mendarat di paha atau pipi kurus Dodo disertai omelan panjang pendek. Kini melihat anak lelakinya menderita seperti ini hati Hindun seperti teriris. Matanya panas, perlahan-lelahan air mata tergelincir di pipi yang jarang tersaput bedak itu.

"Ma...maafkan, Emak...Do..." Hindun merengkuh tubuh Dodo. Dibungkusnya dengan sarung, lalu ia tegakkan. Kaki Dodo yang mulai jenjang membuatnya kesusahan ketika hendak menggendong di punggung. Napas Hindun tersengal. "A...ayo kita cari Bapakmu..."

Banjir pun semakin tinggi. Gerombolan awan gelap menyungkup langit. Terseok, Hindun menggendong tubuh Dodo. Bayangan buruk akan nasib anaknya membuat tenaga perempuan itu berlipat ganda. Ia menerabas genangan air, tak peduli udara dingin menusuk kulit dan tulang.

"Bang Kohar...!! Di mana kamu, Bang...!!!!" teriaknya histeris.

"Mau ke mana kamu, Ndu...?" tanya Mpok Siti,

tetangga sebelah yang tengah sibuk menguras teras rumahnya dengan ember.

"Bawa-bawa Dodo lagi..." timpal Husen. Suami Mpok Siti itu tak kalah heboh dengan istrinya. Lelaki kurus berkepala plontos itu menenteng ember berukuran lebih besar. "Hoi...mau dibawa kemana anakmu?!"

Hindun tak menggubris. Ia terus berteriak-teriak memanggil Kohar. Tak peduli tatapan aneh suami-istri tetangganya itu. Mungkin dalam benak mereka menganggap Hindun sudah mulai tak waras. Tujuannya kini hanya satu. Bertemu dengan Kohar dan Dodo lekas mendapat pertolongan.

Jarum-jarum air dari langit menghujam deras. Bolak-balik Kohar ke luar-masuk pos penjagaan. Sudah seminggu, Kusdi, teman sejawat yang bertugas shift malam pulang kampung. Lelaki tegap itu mesti menjaga pos sendirian. Jengah, ia teguk kopi hitam bekal dari rumah. Baginya kopi buatan Hindun paling sedap. Racikan kedai kopi manapun kalah. Apalagi jika dibandingkan dengan seduhan para penjual kopi sachet keliling.

Bersama Hindun, Kohar telah menjalin rumah tangga hampir lima belas tahun. Walaupun sedikit cerewet, Hindun adalah istri yang mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kehadiran Dodo menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Rasa kangen perlahan merayap. Terbayang tadi sore anak kesayangannya itu merengek minta ditemani bermain air hujan. Tak pelak kaos bocah sebelas tahun itu kuyup. Bibir Hindun pun merepet tak henti melihat ayah dan anak itu tertawa-tawa riang di bawah guyuran hujan.

"Eit...Busyet...!" teriak Kohar kaget. Lamunannya mendadak buyar bercerai. Seekor cicak jatuh tepat di kepala. Reflek ia menggeleng. Reptil itu pun terbirit mencari pasangannya yang bersembunyi di sebalik jam dinding.

Beberapa jenak suasana kembali lengang. Sedari dua jam lampau, tiada lagi kendaraan hilir mudik. Hawa atis membuat para penghuni kompleks terlelap. Perumahan yang dihuni warga kalangan menengah itu terletak di lembah. Di depan pos jaga sebelum masuk gerbang, terdapat sungai. Letaknya lebih tinggi di bandingkan kompleks perumahan yang dibangun. Airnya kotor menghitam. Kala musim kemarau, bau tak sedap menguar tajam. Para penduduk kampung sekitar menjadikan sungai tersebut area pembuangan sampah gratis. Plastik, potongan sayur, ataupun bangkai tikus berbaur.

Detik - detik melaju cepat. Jalan depan rumah-rumah warga mulai tergenang. Hati Kohar

Feature

sontak mencelos. Spontan ia menyambar payung yang terletak di sudut pos. Gegas, setengah berlari menuju bantaran sungai. Air sungai telah meluap. Serbaneka sampah mengapung dipermukaan. Firasatnya mengatakan tak sampai tengah malam, air akan mengepung kompleks perumahan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Terburu Kohar kembali ke pos penjagaan. Mesti dilaporkannya kejadian darurat ini kepada Ketua RW. Lalu akan dihubungnya juga Hindun. Mengecek apakah keadaan anak dan istrinya baik-baik saja. Saban musim penghujan, rumah petak yang mereka tinggal juga tak pernah luput dari banjir. Gubernur boleh berganti orang, tapi air bah selalu setia datang berkunjung. Seperti penjajah yang datang tak diundang tanpa permissi.

Sebagai seorang suami, ingin ia membawa keluarganya pindah rumah yang nyaman dan bebas banjir. Ingin dibangunnya rumah megah di daerah pegunungan berhawa sejuk. Bebas dari hiruk pikuk dan kemunafikan metropolis. Tapi apakah daya, orang kecil seperti Kohar hanya bisa berkhayal. Takdir si pungguk yang senantiasa merindukan keindahan sang rembulan.

Dinyalakannya handphone yang sedang discharge. Sejurus ia tercekat. Bertumpuk panggilan tak terjawab dari Hindun muncul di layar. Bukan tabiat Hindun meneleponnya berkali-kali. Pasti ada hal penting yang akan disampaikan. Lekas ia hubungi balik nomor istrinya. Nihil, tak berbalas. Cemas pun sontak membuncah.

Ada apa ya dengan Hindun? Apakah banjir di rumah parah? Atau ada sesuatu dengan Dodo? Apa anak itu membuat ulah keterlaluan hingga Emaknya marah? Sederet tanya berloncatan dalam otak Kohar. Butiran keringat dingin mulai bermunculan di kening. Kalut membuatnya lupa hendak menelepon Ketua RW.

Wajah Dodo melela di pelupuk mata. Sebagai anak semata wayang, bocah itu menjadi harapannya untuk mengangkat derajat orang tua. Ia bersyukur Dodo tumbuh menjadi anak yang cerdas walaupun keras kepala.

Terkadang, Kohar berselisih paham dengan Hindun. Ia selalu meluluskan apa yang menjadi permintaan Dodo. Tentu saja sebatas yang ia mampu. Sebaliknya, Hindun tak sependapat bila Dodo terlalu dimanja oleh bapaknya. Sebenarnya, Dodo bukanlah anak satu-satunya pasangan suami-istri itu. Abang si Dodo meninggal dalam kandungan sebelum sempat dilahirkan. Kata bidan yang membantu persalinan, bayi itu keracunan air

ketuban yang belum saatnya pecah.

Layar handphone berkeredap. Ada panggilan masuk. Tergagap Kohar memencet tombol tanpa melihat nama yang tertera. "Halo, Ndun...kemana saja sih, lu...Abang telpon kok nggak diangkat-angkat!" semprotnya gemas.

"Ini bukan Hindun, Har..." Kohar tergeragap. Suara yang terdengar bukan suara Hindun tapi suara seorang lelaki.

"Si...siapa ini?" terang Kohar dengan rasa yang mulai teraduk.

"Ini Husen, Har! Kamu harus cepat pulang sekarang!"

"Kenapa, Bang? A...ada apa ?! Rumah kebanjiran parah?!" berondong Kohar tak sabar.

"Anakmu Har. Si Dodo..."

"Kenapa dengan si Dodo?" sambar Kohar cepat. "Dodo lagi kritis. Panasnya tinggi banget. Sekarang lagi di posko. Mau di bawa ke rumah sakit!"

Bagai disambar geledek Kohar mendengar penjelasan Husen. Secepat kilat ia raih kunci. Tanpa helm dan mantel, lelaki itu melajukan motor dengan kecepatan tinggi. Keringat dan air hujan membuat seragam satpamnya kuyup dan lengket. Saat berbelok di perempatan, nasib naas nyaris datang menghampiri. Tak lebih dari setengah depa motornya hendak terserempet mobil yang berpapasan.

"Hoi...kamu pengen cepat mati, ya!" serapah si sopir mobil. Kohar tak peduli. Bayangan Dodo yang tengah kesakitan dan wajah Hindun yang panik berseliweran. Ia terus melajukan motor seperti orang kesetanan.

"Ya Allah...Ampunilah dosa hamba...Janganlah musibah tiga belas tahun lalu berulang lagi..." Bibir pucat Kohar tak henti merapal doa. Hatinya menjerit, memohon kemurahan-Nya.

Sementara itu genangan air di jalanan kompleks perumahan telah mencapai mata kaki. Tak sampai tigaperempat jam dipastikan air akan menjelajah teras. Di salah satu rumah warga, seorang lelaki sedang mendengkur pulas di sofa dengan TV masih menyala. Runing teks peringatan mara bahaya mondar-mandir di layar. Bergerak dari kanan ke kiri. Waspadalah, banjir bandhang kembali melanda ibu kota. Ya, Allah, kapan masalah ini akan selesai? (*) Rumah Hijau, 24032019

* * *

Resensi Film

Suguhan Film Action dengan Pesan Moral



Majalah Kematitan - Kisahnya bermula dari empat orang mantan marinir AS yang pada waktu mengabdikan kepada negaranya telah berjasa dan pernah berjuang di berbagai medan tempur besar. Namun demikian hal tersebut seakan tak dianggap, dan bahkan para pahlawan negara tersebut seakan hanya menjadi "pecundang", semisal Tom 'Redfly' Davis (Ben Affleck) yang seorang duda cerai dan bekerja serabutan sebagai agen penjual property yang bisa dibilang gagal, Ben (Garret Hedlund) yang harus bersimbah darah setiap kali dirinya bertarung di arena tinju bebas amatir, Frans 'Catfish' Morales (Pedro Pascall) yang dicabut lisensi terbangnya karena kedapatan membawa narkotika dan William (Charlie Hunnam) yang bekerja sebagai motivator bagi para tentara baru. Semuanya berubah saat mereka kedatangan salah seorang rekan mereka dahulu, ia adalah Santiago 'Pope' Garcia (Oscar Isaac), yang bertugas di kepolisian Meksiko khusus menangani para kartel narkoba kelas kakap.

Disini Pope lantas menawarkan pekerjaan kepada empat orang rekannya tersebut. Pekerjaan itu bukanlah operasi militer, namun berencana untuk merampok uang jutaan dollar milik raja narkoba Tuan Lorea yang tersimpan di rumahnya yang tersembunyi di hutan belantara Meksiko.

Namun pada prosesnya, misi perampokan ini tidak berjalan mulus dan terjadi berbagai masalah tak terduga dan hampir mrmbuat misi ini gagal. Konflik-konflik mulai bermunculan di pertengahan film, namun sayangnya hal ini kurang tersaji dengan baik dan alur cerita sedikit mudah ditebak.

Tapi tidak perlu khawatir, film ini dibuka dengan adegan khas film action Hollywood. Para pemeran khususnya Ben Affleck memainkan perannya dengan sangat baik. Walaupun bukan actor utama, namun pemeran Bruce Wayne di Film Justice League ini selalu bermain baik dan selalu mencuri perhatian penonton.

Film ini juga berisi pesan moral yang sangat relevan untuk diterapkan di kehidupan nyata, bahwasanya keserakahan dan perasaan tidak puas dapat merugikan anda dan orang sekeliling anda, namun kecerdikan dan kebijaksanaan hampir pasti dapat menguntungkan anda dan juga orang di sekeliling anda.

Sutradara	: J. C. Chandor
Produser	: Charles Roven Alex Gartner Andy Horwitz Neal Dodson
Penulis Cerita	: Mark Boal
Pemain	: Ben Affleck Oscar Isaac Charlie Hunnam Garrett Hedlund Pedro Pascall Adria Arjona
Distribusi Tanggal Rilis	: Netflix : Maret 2019

Galeri Foto



Presiden RI Joko Widodo dan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Pelantikan Kepala Staf TNI AD, Senin (26/11).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Mengunjungi Gempa di Banten bersama Deputi Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamiludin, Jumat (28/12).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Meninjau Sungai Citarum, Rabu (05/12).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Kunjungan Ke Bea cukai Batam bersama Menkeu, Panglima TNI, dan Kapolri, Selasa (15/01).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Uji Coba Mobil Biodiesel B50 Sawit, Kamis (31/01).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Berkunjung Ke Kota Surabaya, Jumat (22/02).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Rapat Kerja Indonesia Bersih bersama KLHK, Kamis (21/02).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Uji Coba MRT Jakarta, Kamis (28/03).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Melihat Lokasi yang terkena dampak gempa Palu, Jumat (05/10).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Mengunjungi Ke Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, Sabtu (02/03).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Mengikuti Archipelagic & Island States Forum di Manado, Jumat (02/11).



Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Pemilihan Putra-Putri Maritim Indonesia 2018, Selasa (02/10).



Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Melakukan Kunjungan Kerja ke UI, Selasa (19/03).

Galeri Foto



Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamiludin mengadakan kembali Technical Meeting of Working Group of Planning bersama Komisi Pembangunan dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok, Rabu (20/03).



Staf Ahlu Sosio-Antropologi Tukul Rameyo Membuka Acara IFSR di Museum Nasional, Kamis (21/03).



Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Mengadakan Rapat Koordinasi Wisata Snorkling, Jumat (01/02).



Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Memimpin Rakor rakernis Spotmar dispotmar dengan TNI AL, Selasa (19/03).



Deputi Bidang Infrastruktur Menyambut Kedatangan Dosen Luar Negeri, di Kantor Kemenko Maritim, Jum'at (01/03).



Ibu Devi Pandjaitan Melakukan Kunjungan Kerja ke Mabes Angkatan Udara Cilangkap, Senin (25/03).



Deputi Safri melaksanakan Workshop Pengembangan Coral Reef Garden Nusa Dua di Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Command Centre Lt.1, Bali, Jumat (22/03).



Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Melakukan Rapat Kerja Bersama Kementerian Perhubungan, Kamis (13/10).



Ibu - Ibu Oase Menjajal Naik MRT Jakarta bersama Menteri Perhubungan, Senin (18/03).



Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Melakukan Kunjungan Kerja Ke PT Buyung Poetra Sembada, Palembang, Kamis (31/01).



**AYO!
NAIK MRT**



**“Ini lebih cepat dari
ngoeng-ngoeng**

- Luhut B. Pandjaitan
Menko Bidang Kemaritiman